

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Oleh :

MERLAN KARUANA

NIM : S.21.18.136

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna melakukan penelitian
Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICH SAN GORONTALO

2022

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI TILAMUTA KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Oleh :

MERLAN KARUANA

NIM : S.21.18.136

SKRIPSI

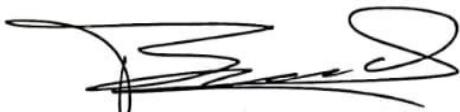
Diajukan sebagai salah satu syarat guna melakukan penelitian pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan
Gorontalo

Pembimbing I



Marten Nusi, S.IP, M.AP
NIDN : 0001038502

Pembimbing II



Balad Arif, S.Sos, M.Si
NIDN 092707704

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Darmawaty Abdul Kazak, S.IP, M.AP
NIDN : 09240767

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

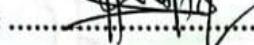
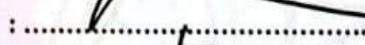
Oleh :

MERLAN KARUANA
NIM : S2118136

SKRIPSI

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : 2022

Komisi Penguji :

1. Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP : 
2. Sandy Prahara, ST., M.Si : 
3. Dr. Arman, S.Sos, M.Si : 
4. Marten Nusi, S.IP., M.AP : 
5. Balada Raf, S.Sos., M.Si : 

Mengetahui



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Merlan Karuana
Nim : S.21.18.136
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul " IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO " adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



MOTTO DAN PERSEMBAAHAN

Motto :

“ Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaan Kepada Allah maka Dia akan mencukupi Mereka.”

(QS.AT-Talaq : 3)

“Barang siapa melibatkan diri dalam pekerjaan Allah SWT, maka Allah SWT akan terlibat dalam pekerjaanya.”

(Abu Bakar As-Shiddiq)

“Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak”

(Mohammad Natsir”

Persembahan :

“ Karena sesungguhnya pasti ada kemudahan sesudah kesulitan”

(AL-INSYIRAH:5)

“Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri.

Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna”

ABSTRACT

MERLAN KARUANA. S2118136. IMPLEMENTATION OF FISHING TOOLS ASSISTANCE PROGRAM IN TILAMUTA SUBDISTRICT, BOALEMO DISTRICT

This study is aimed at finding the implementation of fishing tools assistance program addressed to the fishermen in Tilamuta Subdistrict, Boalemo District. This study employs a qualitative method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is interactive data analysis. The results of the study indicate that the implementation of the fishing tools assistance program provided by the Marine Affairs and Fisheries Department has provided benefits to traditional fishermen in increasing fish catches. However, the assistance program has not been properly realized and has not been optimally managed by the fishing groups. Not all fishermen of their group experience the same benefits with the fishing tools program donated. The description of the policy aspects of this program has not been followed up with guidance to fishing groups. It is not supported by adequate funding, human resources, facilities, and infrastructure. The information aspect shows that the fishing community that manages the assistance is lack sources of information in managing the assistance provided. The support aspect shows that there are extension workers who are less active in coaching and assisting fishing groups in assisting fishing tools and monitoring and evaluating teams considered less than optimal. The aspect of potential distribution shows that this assistance distribution program has not been followed by clarity on the authority to use assistance. The assistance is not experienced by all members of traditional fishing groups because there are no strict rules to regulate the use of fishing tools in rotation.

Keywords: program implementation, Marine Affairs and Fisheries Department

ABSTRAK

MERLAN KARUANA. S2118136. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program bantuan alat tangkap kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah teknik analisis interaktif data yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian implementasi program bantuan alat tangkap ikan yang di berikan oleh dinas kelautan dan perikanan telah memberikan manfaat kepada nelayan tradisional dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan. Akan tetapi program bantuan tersebut belum terealisasi dengan baik dan belum terkelola dengan maksimal oleh kelompok nelayan. Dimana belum semua anggota nelayan tergabung dalam kelompok nelayan merasakan manfaat yang sama yang di berikan dari program alat tangkap yang dihibahkan. Deskripsi aspek kebijakan program ini belum di ikuti dengan pembinaan kepada kelompok nelayan dan kurang di dukung pendanaan yang mendai, sumber daya manusia, serta sarana dan prasananya. Aspek informasi menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang mengelola bantuan kurang memiliki sumber informasi dalam mengelola bantuan yang diberikan: aspek dukungan menunjukkan adanya petugas penyuluhan yang kurang aktif dalam melakukan pembinaan dan mendampingi kelompok nelayan dalam bantuan alat tangkap ikan serta tim monitoring dan evaluasi yang kurang maksimal; dan aspek pembagian potensi menunjukkan bahwa program penyaluran bantuan ini belum diikuti dengan kejelasan terhadap kewenangan penggunaan bantuan sehingga bantuan tersebut tidak dinikmati oleh semua anggota kelompok nelayan tradisional karena tidak ada aturan yang tegas untuk mengatur penggunaan alat tangkap ikan secara bergilir.

Kata kunci: implementasi program, Dinas Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, banyak nikmat yang telah ALLAH berikan, segala puji hanya untuk ALLAH. Tuhan yang maha Esa atas segala Rahmat, serta Hidayahnya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini judul "**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**" skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Arman M.Si selaku Dekan Fakultas Sospol, Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.Ip, M.Ap Selaku Ketua Jurusan Sospol Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Marten Nusi, S.Ip.,M.AP Selaku Pembimbing I Dan Bapak Balada Raf, S.Sos.,M.Si Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis dalam mengerjakan usulan skripsi ini dan semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Teman – teman seperjuangan Sospol yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, dukungan, serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak memperoleh imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Gorontalo,....Juni 2022

Merlan Karuana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBERAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik	5
2.1.1 Konsep Kebijakan	5
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	6
2.3 Model Implementasi Kebijakan	9
2.4 Konsep Program Bantuan Alat Tangkap Ikan.....	11
2.5 Ketangka Pikir	12

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian	14
3.2 Metode Penelitian.....	15
3.3 fokus Penelitian	15
3.1 Lokasi Penelitian	16
3.5 Informan Penelitian	16

3.6 Sumber Data	17
-----------------------	----

3.7 Teknik Pengumpulan Data	17
-----------------------------------	----

3.8 Analisis Data	18
-------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Penelitian	20
-------------------------------	----

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	22
---	----

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	23
------------------------------------	----

4.1.3 Sumber Daya Manusia	24
---------------------------------	----

4.1.4 Sarana dan Prasarana.....	28
---------------------------------	----

4.1.5 Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	28
--	----

4.2 Hasil Penelitian.....	30
---------------------------	----

4.2.1 Implementasi Program Bantuan Alat Tangkap Di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Tilamuta	30
--	----

4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implemtasi Program Bantuan	35
---	----

4.3 Pembahasan	42
----------------------	----

4.3.1 Alur Perencanaan Program.....	42
-------------------------------------	----

4.3.2 Mekanisme Perumusan Program.....	44
--	----

4.3.3 Kendala atau Hambatan dama Penyaluran Bantuan	48
---	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	49
---------------------	----

5.2 Saran	50
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya pesisir berperan penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi daerah otonom dan nasional melalui peningkatan penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Potensi sumber daya tersebut memerlukan program-program pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemanfaatan perikanan tangkap, yang melibatkan masyarakat pesisir pada Pumumnya dan nelayan pada khususnya, dan diturunkan secara turun temurun. Perikanan tangkap adalah kegiatan yang melibatkan penangkapan ikan atau penangkapan hewan dan tumbuhan laut untuk memanfaatkan sumber daya hayati laut.

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Menurut data terakhir Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 wilayah kecamatan. Menurut laporan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.510,4 km memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar khususnya di sektor perikanan dan kelautan, baik dari perikanan tangkap perikanan budidaya air payau. Perairan yang dimiliki Kabupaten Boalemo dengan panjang garis pantai ±

72 km menyimpan berbagai ikan laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti tuna, cakalang, laying dan kerapu tikus (PEMKAB BOALEMO, 2008).

Masyarakat nelayan di Kabupaten Boalemo sebagian besar masih tergolong sebagai nelayan tradisional karena dari jenis alat tangkap yang digunakan seperti pancing ulur, bagan perahu, jaring insang dasar dan payang. Hal ini sejalan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Beragam jenis bantuan telah diberikan kepada kelompok nelayan. Bantuannya berupa sarana prasarana penangkapan ikan. Dan hasil tangkapan ikan nelayan sangat dipengaruhi oleh pola musim (bulan gelap dan bulan terang).

Selain itu hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas penambangan lepas pantai. Aktivitas penambangan timah yang mendekati pantai menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir (Adi), 2012). Peningkatan dan penurunan hasil tangkap ikan nelayan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan.

Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, salah satunya dengan dibuatnya program pendampingan perikanan tangkap bagi nelayan tradisional. Dalam pengelolaan bantuan perikanan tangkap disebutkan bahwa program bantuan yang ditawarkan kepada kelompok digilir, meskipun beberapa kelompok tidak mendapat giliran menggunakan perahu dan mesin/perahu motor yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, sehingga sering menimbulkan keluhan dari anggota. Selain itu, pembagian jaring ikan kepada

kelompok nelayan tradisional dilakukan setiap tahun, terlepas dari jumlah nelayan saat ini. Ada keluhan dari nelayan, terutama dari organisasi nelayan.

Program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan alat penangkapan ikan sangat diharapkan bagi nelayan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, beragam jenis bantuan telah diberikan kepada kelompok nelayan. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berupa sarana prasarana penangkapan ikan. Antara lain perahu fiber, mesin temple, mesin ketinting, perahu bagan, jaring ikan dan keranjang ikan.

Petunjuk teknis terhadap program bantuan alat tangkap ikan sebagaimana yang tercantum merupakan acuan bagi kementerian kelautan dan perikanan, pemerintah daerah,,dan nelayan dalam penyaluran bantuan kapal penangkapan ikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin agar bantuan alat pengakapan ikan disalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi menurut pandangan saya terdapat berbagai macam masalah dalam pelaksanaan program yaitu masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui program itu terlaksana. Dan adapun masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang telah di programkan seperti ada masyarakat yang memang pekerjaannya atau mata pencahariaanya sebagai nelayan tapi tidak

pernah mendapatkan program bantuan tersebut. Bahkan ada yang profesinya bukan nelayan justru dia yang mendapatkan bantuan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pelaksanaan program bantuan alat tangkap ikan di kecamatan tilamuta kabupaten boalemo

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan alat tangkap ikan di kecamatan tilamuta kabupaten boalemo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Konsep Kebijakan

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seirang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Salah satu definisi mengenai kebijakan public diberikan oleh Robert Eyeslone. Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan public adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang. Kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Kebijakan publik dapat disimpulkan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan bulik.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan.

Implementasi merupakan penyediaan sara untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara teori, implementasi kebijakan adalah cara suatu kebijakan untuk mewujudkan tujuannya. Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2012: 101-102) adalah instrumen administrasi hukum di mana banyak aktor, organisasi, prosedur, dan pendekatan berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Akibatnya, implementasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Namun, ketika mengembangkan kebijakan, pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat. Suatu kebijakan tidak seharusnya berbenturan dengan masyarakat, apalagi merugikan masyarakat.

Memahami pelaksanaan kebijakan tersebut di atas, George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, antara lain: Comunication (Komunikasi)

1. Resources (Sumber Daya)
2. Disposition (Disposition)

Pertama, komunikasi implementasi masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implemetasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Akan tetapi apabila

implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (aparat) sangat penting dalam implementasi kebijakan; karenanya, selain memadai, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan juga harus memiliki pengalaman dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, rekomendasi, dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, dalam sumber daya manusia, harus ada ketepatan dan kepantasan dalam jumlah karyawan yang dibutuhkan dan pengetahuan yang mereka miliki dalam kaitannya dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksanaan kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Sedangkan itu, menurut Grindlle juga memberikan pandangan tentang implemetasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system,” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang di inginkan.

2.3 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat.adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah ada secara teori adalah,

Menurut Mutland (Hamdi, 2014:98), literatur implementasi kebijakan dibagi menjadi dua kategori: pendekatan top-down dan bottom-up. Perancang kebijakan adalah aktor penting dalam implementasi kebijakan, menurut kelompok top-down. Kelompok top-down juga berfokus pada variabel atau faktor makro yang dapat diubah di tingkat pusat. Pendekatan bottom-up berfokus pada dua hal: kelompok sasaran dan penyedia layanan. Variabel mikro menjadi fokus kelompok bottom-up. Kelompok ketiga berusaha mendekatkan kedua kelompok dengan menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan yang tidak jelas dan kontradiktif.

Model van Meter dan van Horn terdiri atas enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan performa seperti berikut.

1. Sumber dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya kebijakan.
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.
4. Karakteristik jabatan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.
6. Disposisi pelaksana

Sebagai kegiatan ilmiah, Hamdi (2014:103) menambahkan bahwa keberatan yang dilontarkan pada model top-down dan bottom-up mendorong munculnya paradigma baru.

1. Model Sabatier

Sabatier percaya bahwa kebijakan harus diperiksa dalam siklus lebih dari sepuluh tahun. Kebijakan diatur oleh sejumlah faktor, yang sebagian besar dapat dengan mudah dikenali dengan menggunakan pendekatan top-down. Variabel-variabel tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi, perangkat hukum, dan struktur dasar pemerintahan.

2. Model Goggin

Goggin mengusulkan model komunikasi untuk implementasi kebijakan antar pemerintah di mana pelaksana pemerintah negara bagian dipilih dari berbagai saluran komunikasi.

3. Model Matland

Menurut literatur tentang implementasi kebijakan, top-downer dan bottom-upers menyelidiki berbagai macam kebijakan. Top-downer lebih menyukai kebijakan yang cukup jelas, sedangkan bottom-upper lebih menyukai kebijakan yang memiliki ketidakpastian yang lebih melekat. Matland menciptakan model ambiguitas/konflik sebagai model kontingensi.

2.4 Konsep Program Bantuan Alat Tangkapan Ikan

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Meliputi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan provinsi. Masyarakat nelayan di Kabupaten Boalemo sebagian besar masih tergolong sebagai nelayan tradisional karena dari jenis alat tangkap yang digunakan seperti pancing ulur, bagan perahu, jaring insang dasar dan payang. Hal ini sejalan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Beragam jenis bantuan telah diberikan kepada kelompok nelayan. Bantuannya berupa sarana prasarana penangkapan ikan. Dan hasil tangkapan ikan nelayan sangat dipengaruhi oleh pola musim (bulan gelap dan bulan terang).

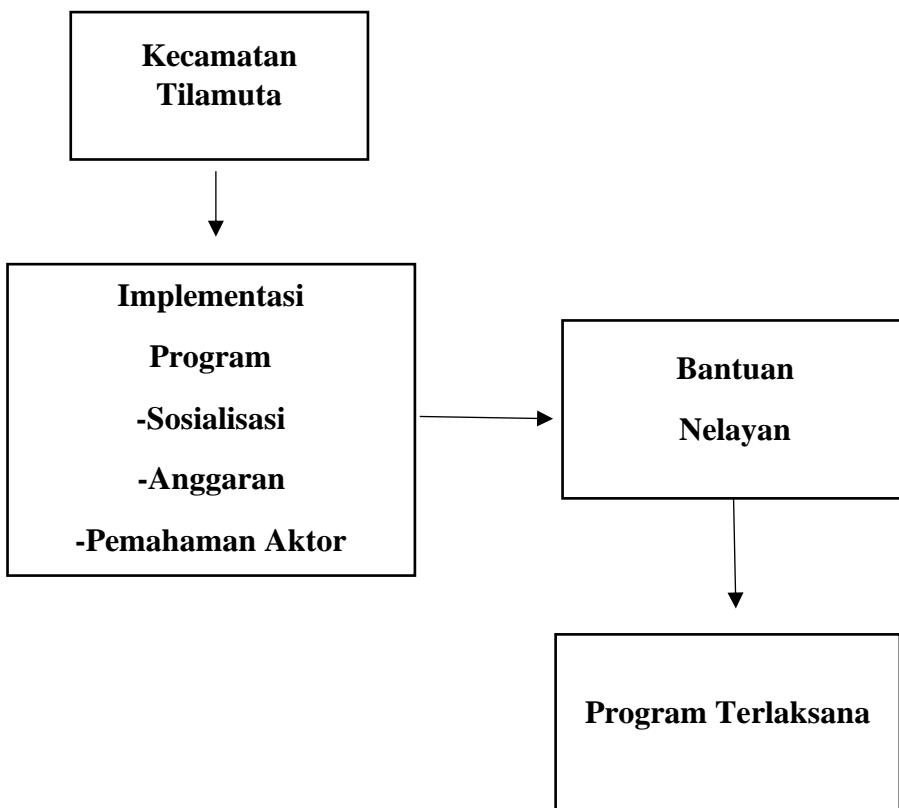
Program. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berupa sarana prasarana penangkapan ikan. Antara lain perahu fiber, mesin temple, mesin ketinting, perahu bagan, jaring ikan dan keranjang ikan.

Program bantuan ini adalah program bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang masing-masing harus mempunyai kelompok nelayannya atau yang sering disebut kelompok usaha bersama (KUB) Dan setiap kelompok harus memiliki anggota minimal 10 sampai 13 orang dan maksimal 15 sampai 25 orang perkelompok.

2.5 Kerangka Pikir

Program bantuan alat tangkap ikan adalah salah satu upaya dari pemerintahan Kabupaten Boalemo khususnya dinas perikanan yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang masing-masing harus mempunya kelompok nelannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dari program bantuan alat tangkap ikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan yang di kecamatan tilamuta kabupaten boalemo. Hasil tangkapan ikan nelayan sangat dipengaruhi oleh pola musim (bulan gelap dan bulan terang), masyarakat nelayan di Kabupaten Boalemo sebagian besar masih tergolong nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari teknologi maupun jenis alat tangkap yang digunakan seperti pancing ulur, bagan perahu, jarring insang dasar, jarring insang hanyut dan payang. Hal ini sejalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah setempet. Beragam jenis bantuan telah diberikan kepada kelompok nelayan. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berupa sarana prasarana penangkapan ikan.

Beberapa program yang diberikan pemerintah terkadang tidak tepat sasaran dan tidak berguna untuk para penerima bantuan. Dalam hal ini pemerintah belum mengetahui kebutuhan yang di inginkan oleh para oleh para penerima bantuan sehingga hasil dari program yang dicanangkan tidak sesuai harapan. Program tersebut sering kali tidak tepat sasaran sehingga memberikan pandangan ketidaksesuaian pada program tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah field research (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa informasi-informasi tertulis atau lisan dari orang-orang terkait. Dalam penelitian ini penulis gunakan untuk mendapat informasi yang mendalam tentang implementasi program bantuan alat tangkap ikan diKecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis penerapan pemerintah dinas kelautan dan perikanan dalam program bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan. Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk narasi bersifat kreatif dalam mendalam serta menunjukan ciri-ciri naturalistic secara otentik. Dengan demikian, fokus analisis penelitian ini adalah bagaimana implementasi program bantuan masyarakat melalui program bantuan alat tangkap ikan.

Selain itu, pengguna metode kualitatif juga sebagai cara penelitian untuk berfikir secara induktif, yaitu penelitian menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang diamati. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan elaku yang diamati (observable).

3.2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berupaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan temuan penelitian secara objektif sesuai dengan fokus kajian penelitian. Olehnya penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Kualitatif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan variabel mandiri yang tidak memasukan variael lain sebagai pembanding yang hasilnya akan memberikan gambaran secara utuh kepada penulis.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan menjadi fokus penelitian adalah: bagaimana implementasi progam bantuan tersebut kepada masyarakat melalui program bantuan alat ikan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Bagaimana pelaksanaan program bantuan dari pemerintah dinas kelautan dan perikanan dalam penyaluran program bantuan yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat nelayan. Berikut adalah implementasi program yaitu :

1. Sosialisasi Program
2. Ketersediaan Anggaran
3. Pemahaman Aktor Pelaksana

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boalemo. pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena penelitian ini ingin fokus pada bagaimana implementasi program bantuan tersebut yaitu alat tangkap ikan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo..

3.5 Informan Penelitian

Peneliti mengamati teknik pengambilan informasi secara purposive yaitu di tetapkan sengaja oleh penulis. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Unsur Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan 2 orang
- b) Tokoh masyarakat 2 orang
- c) Para nelayan 2 orang

Para informan diatas dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut adalah orang-orang yang mengetahui kajian penelitian yang di lakukan.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini :

1. Primer, adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.
2. Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang diteliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara antara lain :

1. Observasi

Observasi dimaksudnya untuk mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan objek dalam penelitian dengan cara mengamati. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu untuk mendalami kegiatan yang terjadi jika dikaitkan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Tujuan dari wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur, semitekstruktur dan tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian.

3.8 Analisis Data

Metode analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007) adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yg mudah dibaca dsn diinterpretasikan.

Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data adalah mencari data, mengumpulkan data-data yang diperlukan tentang berbagai macam dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian merekam data-data tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data.
2. Reduksi data adalah pemilihan, penghentian perhatian pada penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang muncul dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menganalisis data secara lebih langsung, membuang informasi yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, proses reduksi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data

dari wawancara dan observasi, yang kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan.

3. Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang lebih valid.
4. Verifikasi atau kesimpulan data adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan di tinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Milles dan Huberman :2007).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo bertanggung jawab melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pengembangan dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan taraf hidup para nelayan, khususnya yang ada di Kabupaten Boalemo. Pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan memiliki cakupan yang sangat luas dan strategis, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai nelayan dan pembudidaya ikan, sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Seiring dengan membaiknya kondisi daerah, inisiatif untuk merehabilitasi perekonomian rakyat harus segera dilaksanakan.

Setelah Kabupaten Boalemo memekarkan diri dari Kabupaten Gorontalo, bidang Kelautan dan Perikanan merupakan sub bidang pada Dinas Pertanian sejak Kabupaten Boalemo terbentuk pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Berdasarkan perkembangan pemerintahan dan kebutuhan

Daerah dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dan layak menjadi salah satu organisasi pemerintah yang otonom maka secara hukum bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Boalemo di bentuk menjadi salah satu dinas dan sudah di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2009 tentang perubahan atas Praturan daerah Kabupaten Boalemo

antara Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unsur/instansi pelaksana teknis dari Departemen Kelautan dan Perikanan di tingkat aerah atau di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang diharapkan dapat berperan dalam megelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya pesisir, laut, pulau-pulau kecil dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan dengan memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal dan merupakan salah satu sektor riil unggulan daerah.

Seperti di amanatkan dalam Impres No. 07 tahun 1999, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berkewajiban menyampaikan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Struktur Organisasi

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peraturan Bupati Boalemo Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka struktur organisasi dan tata kerja pada SOPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Dinas dan Membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian
- c. Bidang Bidang Perikanan Tangkap
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Kenelayanan
 3. Seksi Usaha Perikanan Tangkap
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 2. Seksi Pemberian
 3. Seksi Usaha Perikanan Budidaya
- e. Bidang Bina Masyarakat
 1. Seksi Pengelolahan Hasil Perikanan
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
 3. Seksi Perizinan dan Retribusi

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Balai Pelayanan Perikanan (BPP) Tilamuta

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan budidaya perikanan, penngembangan perikanan tangkap dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan TPI dalam lingkup tugas dinas
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pegelolaan informasi data kelautan dan perikanan serta memberikan laporan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3. Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun 2019 terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 41 (empat puluh tiga) orang, terdiri dari 22 orang laki-laki (dua puluh dua) dan 19 (sembilan belas) orang perempuan ;
2. Non PNS/ Tenaga Kontrak 43 (empat puluh tiga) orang, terdiri dari 19 (Sembilan belas) orang laki-laki dan 24 (dua puluh empat) orang perempuan ; dan
3. Penyuluh Perikanan bantu 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.

Komposisipersonil di atas tersebar di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo serta Tempat Pelelangan ikan (TPI), sehingga koodinasi dan sinegritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dan sistem kerja yang dibangun secara sistematis terutama kerja sama yang baik agar berjalan sesuai harapan.

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo sampai dengan 31 desember 2020 berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S2)	-
2.	Pendidikan Sarjana (S1)	25 Orang
3.	Pendidikan Sarjana Muda (D3)	4 Orang
4.	Pendididkan SLTA/ Sederajat	14 Orang
5.	Pedidikan SLTP/ Sederajat	-
6.	Pendidikan SD/ Sederajat	-
	Jumlah	43 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, rata-rata memiliki S1. Kondisi tersebut dilihat dari kwalitasya cukup memadai, dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis administrative maupu di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam diklat penjejangan, diklat kepemimpinana, diklat fungsional serta diklat teknis lainnya. Denga demikian kualitas pegawai DDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani pengelolaan sektor kelautan di Kabupaten Boalemo.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo samapi dengan 31 Desember 2020 di lihat dari pangkat dan golongannya, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Pangkat dan Golongan PNS

NO	PANGAKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda - IV/c	-
2.	Pembina Tk. 1 - iv/b	1 Orang
3.	Pembina - IV/a	-
4.	Penata Tk. 1 - III/d	10 Orang
5.	Penata - III/c	7 Orang
6.	Penata Muda Tk.I -III/b	8 Orang
7.	Penata Muda - III/a	-
8.	Pengatur Tk.I- II/d	4 Orang
9.	Pengatur - II/c	6 Orang
10.	Pengatur Muda Tk.I-II/b	5 Orang
11.	Pengatur Muda –ii/a	-
12.	Juru Tk. I-I/d	-
13.	Juru – I/c	-
14.	Juru Muda Tk.I-I/b	-
15.	Juru Muda –I/a	-
	Jumlah	41 Orang

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional, adalah sebagai brikut :

Tabel 1.3 Eselonisasi dan Jabatan Fungsional PNS

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	12 Orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	24 Orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-
	Jumlah	41 Orang

Berdasarkan jumlah informasi jabatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo memiliki 17 Jabatan structural, dan formasi jabatan tersebut samapai dengan 31 desember 2020 telah terisi sebanyak 17 jabatan structural.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah di tetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo di dukung dengan sarana dan prasarana dengan nilai keseluruhan per 31 desember 2020 sebesar 13.377.509.869,-

Tabel 1.4. Daftar Inventaris Barang

URAIAN	NILAI (Rp.)
ASET TETAP	13.377.509.869,00
TANAH	103. 194.000,00
PERALATAN DAN MESIN	6.223.520.229,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	6.208.265.190,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	842.530.450,00
ASET TETAP LAINNYA	0,00
KONSTRUKSI DALAM PEGERJAAN	0,00
ASET LAINNYA	18.213.947.422,00
JUMLAH	31.591.457.291,00

4.1.5.Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk di hasilkan. Dengan penetapan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mngarahkan dan mengelola program atau kegiatan menjadi lebih baik sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unsur/instansi pelaksana teknis dari Departemen Kelautan dan Perikanan di tingkat Daerah atau dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang diharapkan dapat berperan dalam mengelola dan mendayagunakan potensi sumber pesisir, laut, pulau-pulau kecil dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan dengan memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal dan merupakan salah satu sektor riil unggulan daerah.

Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan TPI dalam lingkup tugas dinas
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data kelautan dan perikanan serta memberikan laporan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Program Bantuan Alat Tangkap Di Kabupaten Boalemo Kecamatan Tilamuta

a. Bentuk Bantuan Perikanan

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kealuatan dan Perikanan oleh Bapak Fanimorai, tanggal 8 Januari 2022 :

bahwa pemerintah Kabupaten Boalemo khusunya di Kecamatan Tilamuta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional. Dukungan kepada kelompok nelayan dalam program bantuan perikanan tangkap kepada nelayan dilakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kelautan dan Perikanan serta bertujuan untuk menaikan taraf hidup masyarakat nelayan dan dengan tujuan meningkatkan ekonomi mereka . diantaranya adalah menjadikan Kabupaten Boalemo msebagai kawasan manipolitan, perencanaan sentra pengolahan hasil perikanan, membuat titik peningkatan kehidupan nelayan, lebih memajukan lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya membantu masyarakat nelayan.

Program Bantuan perikanan tangkap kepada nelayan tradisional di Kabupaten Boalemo Kecamatan Tilamuta merupakan bagian dari pembangunan sektor kelautan dan selama ini kelompok nelayan tradisional memiliki kekurangan

dan ketidakberdayaan untuk memanfaatkan potensi laut yang melimpah melalui program ini, akan lebih meningkatkan kondisi sosial ekonomi nelayan atau lebih menaikkan taraf hidup masyarakat pesisir pantai yang selama ini rentah dengan ekonomi lemah. Tentu saja menjadi sebuah ironi, manakalah potensi sektor kelautan yang dimiliki kecamatan tilamuta tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hidup para masyarakat pesisir pantai yang mencari nafkah sebagai nelayan.

Program bantuan alat tangkap ikan yang diberikan secara hibah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Tilamuta termasuk dalam kategori alat tangkap modern, dimana dengan alat tangkap tersebut hasil dari tengkapan alat lebih banyak dibandingkan dengan cara yang sering dilakukan yaitu dengan cara tradisional, namun tidak semua kelompok nelayan menerima jenis alat tangkap yang sama. Karena jenis bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Tilamuta sesuai dengan jenis bantuan yang disebutkan dalam proposal yang diajukan kelompok nelayan tersebut. Biasanya bantuan tersebut berupa satu paket perahu/ fiber yang minimal 7-9 meter dan berupa mesin/ motor laut serta alat tangkap ikan.

bantuan yang diberikan mengacu pada kebutuhan nelayan tradisional, terbukti dari tata cara pemberian bantuan yang disampaikan langsung oleh kelompok nelayan melalui proposal. Salah satu aspek yang mempengaruhi besaran bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan di Kecamatan Tilamuta adalah bantuan yang diajukan tidak hanya kepada nelayan di Kecamatan Tilamuta, tetapi juga kepada nelayan di kecamatan lain yang memiliki akses

langsung ke laut. Seperti diketahui, di Kabupaten Boalemo ada enam kecamatan. Kecamatan Dulipi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Mananggu adalah nama-nama kecamatan tersebut. Dan kecamatan Tilamuta, yang meliputi pentadu timur, pentad barat, tenilo, bajo, dan lamu terletak di pesisir pantai. jumlah kelompok nelayan dari 5 desa di kecamatan tilamuta tersebut 127 sejak tahun 2019-2021
(wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Bapak Fanimorai, tanggal 8 Januari 2022 pukul 9.25 wib)

b. prosedur Penyaluran Bantuan

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Nurain pegawai di bidang seksi kenelayanan, tanggal 6 Januari 2022 mengatakan bahhwa :

program bantuan perikanan alat tangkap dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan nelayan tradisional melalui sosialisasi para nelayan. Perencanaan yang dimulai dari bawah dan berlanjut ke atas, tergantung pada kebutuhan masyarakat nelayan. Program dukungan perikanan tangkap, dengan sistem seperti ini, memungkinkan nelayan tradisional lebih aktif merancang barang-barang yang mereka yakini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak hasil tangkapan.

Proses pemberian bantuan diawali dengan pengajuan permohonan bantuan berupa proposal, yang meliputi informasi pembentukan kelompok nelayan, alamat kelompok nelayan, susunan pengurus kelompok nelayan, dan jenisnya. bantuan yang diharapkan secara rinci. Departemen Kelautan dan Perikanan akan

mengidentifikasi dan memverifikasi penerima manfaat sebelum mendistribusikan dana secara langsung kepada mereka.

Adapun persyaratan yang harus dilakukan oleh para kelompok calon penerima bantuan yaitu, masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan wajib masuk ke dalam koprasa nelayan atau minimal terdaftar dalam kelompok berbadan hukum. . berikut nama-nama koprasa nelayan dan nama-nama kelompok berbadan hukum yang ada di Kecamatan Tilamuta yaitu:

- **Koprasa Nelayan Kecamatan Tilamuta**

1. Koprasa Centuri Jaya, yang bertempat di Desa Pentadu Timur
2. Koprasa Mina Mandiri, yang bertempat di Desa Pentadu Barat
3. Koprasa Bintang Timut, yang bertempat di Desa Tenilo
4. Koprasa Masyarakat Pesisir Sejahtera, yang bertempat di Desa Bajo

- **Kelompok Berbadan Hukum**

1. Kelompok Armada
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB)
3. Kelompok Sahabat Nelayan Boalemo (SNB)

Program Bantuan alat tangkap ini biasanya di salurkan setiap tahun dan di anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi informasi dari informan anggarannya lebih banyak dari DAK atau dari pusat.

c. Manfaat yang Diperoleh Nelayan

Keterbatasan yang dimiliki nelayan membuat mereka sulit untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Keadaan ini setidaknya dapat kita perhatikan dalam kehidupan dua orang nelayan tradisional yang menjadi informan

dalam penelitian ini di kecamatan Tilamuta, desa pentadu timur. Sumber penghasilan utama mereka adalah nelayan. Jika cuaca tidak memungkinkan melaut jadi penghasilan sebagai pekerja nelayan yang di peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Nelayan di Kecamatan Tilamuta terus berjuang menangkap ikan dengan peralatan seadanya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap produksi hasil tangkapan. Tangkapan yang terbatas sangat mempengaruhi kesejahteraan finansial keluarga mereka. Nelayan tradisional sangat rentan terhadap kemiskinan akibat keterbatasan ini. Tujuan dari program pendampingan perikanan tangkap ini adalah melepaskan nelayan tradisional dari kecamatan Tilamuta agar hasil tangkapannya bisa lebih produktif. Program dukungan perikanan tangkap Pemkab Boalemo tak pelak lagi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jika proses pelaksanaan program pendampingan perikanan tangkap dilaksanakan dengan benar, maka tujuan akan tercapai.

Seperi yang telah disampaikan sebelumnya, program bantuan perikanan tangkap merupakan subsidi langsung dari Pemkab Boalemo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap alat penangkapan ikan kepada nelayan. Akibatnya, karena bantuan tersebut merupakan alat, maka akan digunakan dan dikelola oleh kelompok nelayan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala bidang perikanan tangkap Bapak Fanimorai, tanggal 8 Januari 2022 bahwa :

program dukungan perikanan tangkap membantu nelayan setidaknya membantu mereka dalam meningkatkan hasil tangkapan, dan nelayan tradisional

yang sebelumnya hanya bisa menangkap ikan di sekitar pantai kini bisa melaut dengan jarak yang lebih jauh. Karena mereka sudah memiliki perahu motor, juga dikenal sebagai perahu ketinting. Manfaat yang dirasakan oleh nelayan yaitu mereka dapat melipatgandakan hasil tangkapan dari sebelum adanya program bantuan ini. Tidak hanya itu dengan peningkatan hasil tangkapan, kini nelayan tradisional dapat membantu keuangan misalnya membiayai sekolah anak-anak. Pemberian bantuan kepada nelayan tradisional memang penting dilakukan karena untuk membeli alat bantu penangkapan ikan yang diberikan oleh pemerintah memerlukan biaya yang cukup besar. Sementara yang kita ketahui bahwa kondisi mata pencaharian mereka sangat minim dan para nelayan tidak memiliki cukup uang untuk membeli alat tangkap tersebut.

4.2.2. Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Program Bantuan

a. Isi Kebijakan

1. Buramnya Kebijakan

Materi program bantuan perikanan tangkap diketahui cukup jelas dan detail, termasuk tata cara pelaksanaan program tersebut. Kejelasan program tentunya akan terlihat pada implementasinya di tingkat bawah, yaitu pada kemampuan implementor atau petugas program menerjemahkan program secara efektif. Petugas atau pelaksana di tingkat bawah memiliki pemahaman yang baik tentang program dan telah mengomunikasikannya dengan baik. UPT PPI Pemankat yang terlibat aktif dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani berperan penting dalam menjelaskan dan memantau bantuan yang telah

diberikan, memastikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

Pada dasarnya, nelayan masih bingung dengan ketersediaan bantuan ini, serta aturan teknis penggunaannya. Dalam hal ini, dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan kepada kelompok nelayan terdistorsi karena program tersebut belum disosialisasikan secara memadai, sehingga nelayan menggambarkan sendiri cara menggunakan alat tangkap tersebut. Kejelasan program pendampingan perikanan tangkap hanya pada level pelaksana kebijakan, dan belum menjangkau kelompok sasaran program. Hal ini juga menunjukkan bahwa program dukungan perikanan tangkap belum tersalurkan dengan baik kepada nelayan. Program yang sudah sangat baik pada tataran birokrasi, belum tentu mendapatkan pemahaman yang baik di tataran penerima program bantuan.

2. Kurangnya Keterapan Internal dan Eksternal

Program pendampingan perikanan tangkap dikembangkan dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo, dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi nelayan tradisional dalam merumuskan isi kebijakan, termasuk jenis bantuan yang akan diberikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa program ini dirancang secara bottom up, dengan pemerintah Kabupaten Boalemo terlebih dahulu menerima masukan dari nelayan tradisional sebelum memberikan bantuan alat tangkap. Informasi yang diperoleh menegaskan bahwa program bantuan perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, memastikan bahwa

program tersebut mendapat dukungan penuh tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan nelayan. Skema pemberian program bantuan ini disusun dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan, sesuai informasi yang diberikan oleh UPT KA PPI Pemangkat. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat nelayan tradisional di Kecamatan Tilamuta memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, Meski perjuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan ikan membawa bahaya besar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah, hasil tangkapan nelayan tradisional akan meningkat, sehingga menghasilkan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui program ini agar tidak terjadi komedi pembangunan dimana potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Boalemo melimpah namun tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

3. Dukungan Sumber Daya

Menurut hasil wawancara dengan nelayan Bapak Rahman, tanggal 20 Januari 2022 mengatakan bahwa :

penyaluran program bantuan perikanan tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo, masih kekurangan sumber daya manusia, terutama dari penyuluhan. Jumlah petugas penyuluhan lapangan yang dialokasikan di Kecamatan Tilamuta masih belum mencukupi untuk mengawal, memantau, dan membina kelompok nelayan dalam pengelolaan penunjang alat tangkap. Walaupun program bantuan perikanan tangkap yang diberikan secara langsung kepada kelompok nelayan tidak di kelolah oleh petugas penyuluhan lapangan,

namun langsung di kelolah oleh kelompok nelayan, tapi pembinaan kepada kelompok nelayan penting dilaksanakan.

Keterbatasan jumlah petugas tersebut mengakibatkan pembinaan kurang berjalan dengan maksimal, sementara kelompok nelayan yang sebagian SDMnya masih rendah dan sangat membutuhkan arahan atau binaan dari petugas langsung. Nelayan tradisional yang menerima bantuan berupa alat tangkap terkena imbas dari tidak adanya arahan atau arahan yang diberikan oleh petugas pembantu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo. Kelompok nelayan tradisional di Kecamatan Tilamuta merasa kurang diberi penyuluhan. Jika kemampuan sumber daya manusia nelayan tidak diperkuat, program dukungan pemerintah akan sia-sia.

Selain dukungan penyuluhan, sumber daya manusia organisasi masyarakat nelayan berperan penting dalam program pendampingan perikanan tangkap, karena mereka adalah kelompok sasaran dan pelaksana, terutama mengelola bantuan alat tangkap secara tepat dan benar. Program dukungan perikanan tangkap ini, seperti diketahui, berupa:

1. Kapal penangkapan ikan
2. Bantuan alat penangkapan ikan
3. Perahu fiber
4. Mesin temple
5. Mesin ketinting
6. Perahu bagan
7. Jaring ikan dan keranjang ikan

8. Pelatihan-pelatihan
9. Pembangunan straiger
10. Tempat pelelangan ikan (TPI)
11. Pangkalan pendaratan ikan (PPI)

Keberadaan kelompok nelayan memiliki peran penting dalam masyarakat nelayan tradisional sebagai wadah menampung aspirasi, pendapat, dan saran anggota, serta membantu anggota jika terjadi kendala, namun pengamatan penulis menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok nelayan belum memiliki berfungsi secara maksimal, terbukti dengan kemampuan ketua kelompok nelayan dalam mengelola bantuan pemerintah untuk alat tangkap. Ketua kelompok khususnya belum mampu menampung anggotanya sehingga mereka dapat memanfaatkan alat tangkap secara bergantian; sebaliknya, anggota kelompok cenderung memonopoli penggunaan alat tangkap yang diberikan.

Sumber daya manusia untuk kelompok nelayan yang mengelola bantuan masih terbatas. Keadaan ini tidak terlepas dari kurangnya penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan oleh penyuluhan lapangan kepada kelompok masyarakat nelayan. Program pendampingan perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo kepada masyarakat nelayan kecamatan Tilamuta tidak didukung oleh sumber daya manusia dari segi jumlah petugas dan kualitas kelompok nelayan, sehingga pendampingan tidak dikelola secara optimal dan dinikmati oleh semua kelompok nelayan.

Program bantuan perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan belum didukung oleh jumlah sarana dan prasarana yang memadai, terbukti dari banyaknya bantuan yang diberikan dengan banyaknya kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan. Terbukti pemberian bantuan penangkap ikan kepada semua kelompok masyarakat nelayan secara bersamaan tidak mungkin dilakukan karena jumlah mereka yang sangat banyak membutuhkan anggaran yang besar. Akibatnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo menggunakan skala prioritas dari proposal untuk memberikan bantuan berdasarkan tawaran yang diajukan oleh kelompok nelayan di Kecamatan Tilamuta. Selanjutnya, nelayan modern atau nelayan asing yang sering melaut di wilayah laut yang menjadi mata pencaharian nelayan di Kecamatan Tilamuta masih tertinggal dari segi alat tangkap, baik perahu motor maupun fasilitas lainnya. Sekalipun program yang dijalankan oleh Pemkab Boalemo berhasil, tetap membutuhkan pengakuan dan pendampingan dalam rangka perbaikan pengelolaan program.

Permasalahan program alat bantuan perikanan tangkap yang tidak sesuai dengan jumlah kelompok masyarakat nelayan di Kecamatan Tilamuta memiliki korelasi atau hubungan dengan pengelolaan bantuan alat tangkap yang harus dirotasi kepada setiap anggota kelompok nelayan. Karena bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota kelompok, maka pengurus secara bergiliran.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurain pegawai di bidang seksi Kenelayaan, tangga 6 Januari 2022 mengatakan bahwa :

Program bantuan ini setiap tahunnya akan tetap ada. Jadi bagi kelompok yang belum mendapatkan program bantuan tersebut akan tetap di salurkan tetapi karena anggarannya yang belum cukup untuk memenuhi semua kelompok jadi di bagi atau bergilir kelompok yang akan mendapatkan bantuan alat tangkap ikan tersebut.

Program bantuan perikanan tangkap belum didanai secara memadai. Hal ini terlihat pada penerapan skala prioritas dalam menentukan bantuan yang diterima dari penawaran kelompok nelayan. Tidak semua permintaan dari kelompok nelayan dipenuhi, terutama untuk peralatan memancing dengan pengeluaran yang tinggi, seperti pendanaan kapal. Untuk mengatasi kekurangan dukungan dana yang maksimal untuk pengadaan peralatan penangkapan ikan. Akibatnya, Dinas menerapkan skala prioritas berdasarkan persyaratan yang dijelaskan dalam proposal. Ketiadaan pembiayaan tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan alat tangkap nelayan tradisional. Karena banyaknya kelompok nelayan yang harus ditolong dengan dana yang terbatas, tidak semua kelompok nelayan mendapatkan bantuan yang sama.

Salah satu kendala yang mempengaruhi keberhasilan program dukungan alat tangkap bagi masyarakat nelayan tradisional di Kecamatan Tilamuta adalah ketidaksesuaian anggaran dengan jumlah kelompok nelayan yang harus dibantu. Dampak minimnya anggaran adalah tidak terpenuhinya jumlah bantuan sesuai usulan kelompok nelayan. Karena keterbatasan dana yang ada, Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Boalemo terus berupaya agar kelompok nelayan yang sebelumnya tidak mendapat bantuan mendapatkan bantuan serupa setiap tahun. Selanjutnya, dengan dana yang terbatas, kelompok nelayan dapat memaksimalkan pengelolaan dukungan yang telah ditawarkan, yang tidak kalah pentingnya.

4.3 Pembahasan

Alur Perencanaan Program

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Bapak Fanimorai, tanggal 8 Januari 2022 bahwa :

dalam mengimplementasikan program bantuan alat tangkap, implementor sudah memiliki informasi yang cukup. Hal ini tidak terlepas dari adanya kesepakatan yang solid antara pihak-pihak terkait, serta hubungan baik dengan masyarakat nelayan tradisional sebagai kelompok sasaran kebijakan Kerjasama yang baik dengan masyarakat nelayan tradisional merupakan sumber informasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menentukan keadaan nelayan tradisional dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi atau disediakan oleh pemerintah kepada organisasi perikanan. Menurut pelaksana program, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, ketersediaan sumber informasi untuk pelaksanaan program pendukung alat tangkap ini tampaknya tidak ada masalah. Namun, sumber pengetahuan kelompok nelayan tampaknya masih terbatas dalam hal pelaksanaan program dukungan alat tangkap, terutama dalam hal pengelolaan bantuan alat tangkap dan tata cara penggunaan alat tangkap tersebut. Dan tidak hanya itu masih ada saja masyarakat nelayan yang mengeluhkan tentang program bantuan tersebut. Dari informasi yang saya ketahui dari beberapa nelayan bahwa

pihak yang menyelenggarakan program tersebut tidak cukup adil dalam memberikan bantuan kepada mereka. Hal ini di karenakan ada salah satu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut malah termasuk dalam daftar penerima. Salah satu syarat untuk mendapatkan program tersebut selain memasukan proposal kelompok nelayan ada juga syarat lainnya yaitu harus benar-benar mempunyai kartu nelayan.

Hal ini yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat nelayan. Karena penyaluran program bantuan ini di isukan tergolong yang istilahnya orang dalam. Menurut mereka jika salah satu pegawai dari dinas yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan para pemohon bantuan pasti akan mendapatkan bantuan tersebut.

Menururt Hasil Wawancara dengan Nelayan Bapak Amran, tanggal mran, tanggal 27 Januari 2022 bahwa :

program bantuan tersebut yang salah satu syarat untuk mengajukan bantuan yaitu membuat proposal yang berkelompok dua orang untuk ukuran perahu standar. Kadang kala meskipun telah memenuhi syarat yang di beritahukan kadang kala meskipun telah membuat proposal bantuan ada juga kelompok yang tidak mendapatkan bantuan alat tangkap tersebut.

Pak AMRAN sendiri mengatakan : “ yah yang namanya proposal kadang dapat kadang tidak. Kata dan waktu untuk menunggu penyaluran bantuan tersebut paling sedikit waktunya 6 bulan kadang juga sampe setahun. Mungkin karena menunggu anggaran.

Program bantuan alat tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo juga terkendala minimnya informasi. Hal ini dikarenakan petugas tidak memberikan arahan kepada kelompok nelayan tentang bagaimana mengelola bantuan dan aspek vital lainnya dari program bantuan..

Mekanisme Perumusan Program

Program Pemberdayaan bantuan alat tangkap ini bertujuan untuk mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupa untuk mengembangkannya. Selain itu juga dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Menurut Nadraha (2000) menegaskan bahwa tujuan mutlak setiap program pemberdayaan adalah peningkatan bargaining position dan bargaining power suatu pihak agar mampu berhadapan secara relative sejajar dengan pihak lain dalam rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang saling menguntungkan.

Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah bahwa ia memungkinkan perkembangan dan penggunaan kemampuan terpendam dalam setiap individu (Wilson, 1996:5).dengan pemberdayaan melalui program bantuan hambatan-hambatan tradisional dihilangkan.

Dalam mengimplementasikan program bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat yang salah satu fungsinya membantu menaikkan taraf hidup masyarakat nelayan berbagai kebijakan pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, apakah implementasi program bantuan terealisasikan dengan benar atau telah di jalankan sesuai dengan Rencana kerja Pemerintah

Dinas Kelautan dan Perikanan, kata yang tepat untuk mewakili istilah “Implementasi” adalah berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Program bantuan perikanan tangkap yang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk meningkatkan produksi hasil laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, membutuhkan bantuan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat pemerintah.

Menurut Ndhara (1982:49) bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi : (a) mengarahkan daya dan dana, (b) administrasi dan koordinasi, (c) penjabaran ke dalam program. Sebagaimana yang dimaksud sebagai partisipasi dalam memikul beban pembangunan, termasuk dalam pengertian ini. Terutama beban brupa material, bahan, tenaga, waktu, tanah, alat, dan sebagainya.

Selain itu, Kebijakan public sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan public menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau di implemetasikan (Wahab, 1997:59).

Implementasi pogram bantuan ini seharusnya sudah disusun secara matang untuk di realisasikan kepada kelompok masyarakat nelayan. Pemerintah sebagai pelaksana program harus memberikan dukungan baik materil maupun non materiil terhadap program tersebut, termasuk setelah program tersebut disampaikan kepada kelompok sasaran program yaitu nelayan tradisional.

Hakikat bantuan tersebut akan terlihat pada bagaimana pelaksanaannya di tingkat bawah, khususnya bagaimana komitmen yang dibuat oleh pejabat seperti

Bupati dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telah direalisasikan dalam pelaksanaan bantuan perikanan tangkap. program bagi masyarakat nelayan tradisional di Kabupaten Tilamuta. Artinya, dukungan dalam bentuk alat tangkap dimaksudkan tidak hanya mencakup penyerahan alat kepada nelayan, tetapi juga pembinaan dari petugas pendamping tentang cara penyelenggaraan program bantuan.

Namun, meski pemerintah mendukung program bantuan perikanan tangkap, jika tidak dibarengi dengan sikap positif dari aparatur, program tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana. Nelayan akan diuntungkan dengan bantuan jenis ini, namun pemberdayaan tidak akan tercapai dengan peningkatan sumber daya manusia nelayan melalui program pendampingan, meskipun tidak ditanggapi secara serius. Program ini mungkin menghasilkan output, tetapi belum tentu menghasilkan outcome yang positif dari para nelayan. desa nelayan dengan sejarah panjang. Dengan kata lain, program bantuan perikanan tangkap, sebagai semacam pemberdayaan masyarakat nelayan tradisional secara bottom-up, akan berdampak signifikan terhadap kehidupan nelayan yang mandiri dan berkecukupan.

Perencanaan terhadap program penyaluran bantuan alat tangkap ikan dilakukan untuk menunjang tugas-tugas dari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo. Dan dalam proses perencanaan tersebut yang terlibat adalah Kepala Bidang, Kepala seksi, dan seluruh staf Dinas Kelautan dan Prikanan. Tujuan dari penyaluran program tersebut yaitu menaikkan taraf hidup masyarakat pesisir dan menaikkan tingkat SDM yang ada di Kabupaten Boalemo.

Proses Implementasi program bantuan perikanan tangkap sudah di atur kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan kewenangan dengan baik. Dalam proses implementasi harus di adakan monitoring serta evaluasi untuk memantau dan menilai semua aktivitas apalagi kegiatan yang bermuatan “ proyek”, maka monitoring dan evaluasi tidak dapat dihindarkan (OECD), Glossary of Key Terms in Evaluation and Reults Based Management, 2002).

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki untuk memberikan bantuan dan pengawasan agar program berjalan dengan baik, penyuluhan di lapangan berperan penting dengan program yang bersifat hibah dan tidak melibatkan banyak pihak, dalam hal ini pemerintah. samping.

Menurut hasil wawancara dengan Nelayan Pak Rahman, Tanggal 20 Januari bahwa :

tidak ada pembagian potensi dalam arti adanya pemisahan kewenangan yang jelas dalam hal pemanfaatan bantuan oleh kelompok nelayan. Sebagai akibat dari kurangnya transparansi ini, administrasi bantuan menjadi tidak terorganisir, dan tidak semua kelompok nelayan mendapat manfaat yang sama dari dukungan yang diberikan. Perahu motor atau mesin penangkap ikan, misalnya, tidak diragukan lagi lebih menguntungkan daripada kelompok nelayan yang hanya mengandalkan pukat plastik atau jaring untuk bantuan. Tidak semua kelompok nelayan tradisional mendapatkan manfaat dari program dukungan perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Tilamuta, karena tidak adanya standar operasional prosedur

(SOP) yang jelas di antara mereka yang mendapatkan bantuan. Hal ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam program yang menunjukkan bahwa program ini tidak dipersiapkan dengan baik ketika diluncurkan, terutama dalam hal masalah teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan di tingkat kelompok nelayan. Lebih lanjut, kelompok-kelompok nelayan yang telah terbentuk selama ini dibentuk semata-mata untuk memenuhi syarat menerima bantuan, bukan sebagai lembaga yang dapat menampung semua kepentingan nelayan.

Kendala atau Hambatan Dalam Penyaluran Bantuan

Adapun kendala-kendala yang berhasil di himpun dalam proses wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Dana
- b. Keterbatasan informasi untuk para nelayan
- c. Kurangnya pembinaan oleh pihak yang melaksanakan program bantuan.
- d. Dan harus ada adanya monitoring serta evaluasi dalam melakukan suatu kegiatan agar terlaksana sesuai tujuan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi di atas, implementasi program bantuan alat tangkap ikan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil implementasi program bantuan alat tangkap ikan bahwa masih banyak kekurangan dalam merealisasikan program tersebut.
2. Pelaksanaan penyaluran bantuan pun masih kurang maksimal baik dari segi penyampaian informasi, pendanaan, dukungan dan pembagian potensi kepada para nelayan maupun cara pengelolaannya belum terkelola dengan baik ditingkat kelompok masyarakat sehingga belum semua anggota kelompok dapat merasakan manfaat yang sama dari bantuan alat tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

5.2 Saran

1. perlunya evaluasi terhadap program bantuan perikanan tangkap kepada masyarakat nelaya tradisional di Kecamatan Tilamuta, dengan menyangkut pengelolaan bantuan alat tangkap kelompok nelayan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan harus membuat peraturan yang jelas mengenai teknis pengelolaan bantuan kepada kelompok nelayan, terutama mengenai penggunaan bantuan secara bergilir, hal ini bertujuan agar terjadinya pemerataan bantuan kepada seluruh kelompok masyarakat nelayan.

3. Perlu juga menambah petugas penyuluhan yang memiliki motivasi tinggi dalam melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan dalam mengelola bantuan dan aspek lainnya.
4. Implementasinya juga harus jelas agar dapat direalisasikan sesuai tujuan yang di rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, 2012. *Peningkatan dan penurunan hasil tangkapan ikan nelayan.* Menteri Perikanan dan Kelautan.
- Budi. Winarno, 2002. *Teori dan proses kebijakan publik* media pressindo Yogyakarta.
- Carl J. Federick, Leo Agustino (2008) Mendefinisikan kebijakan public, intermedia Jakarta.
- Georgie E. Edward III, Nawawi (2003) *Hal-hal yang dapat mempengaruhi implementasi*
- Grindle, 1980. *Politics and policy implementation in the Third World.*
- Mutland. Hamdi, 2014. *literatur mengenai kelompok implementasi kebijakan*
- Nurdin Usman, *teori implementasi*
- Perairan yang dimiliki Boalemo (PEMKAB BOALEMO, 2008)
- Robert Wyestone (1997). *The Thereads of policy: A study ini policy Leardership*
- Sugiyono (2008) *Penelitian kualitatif adalah penelitian yang variabel,* intermedia Jakarta
- Van Meter and van Horn “*The Police Implementation processs*”
- Nadraha (1982:49) *Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara,* Jakarta
- Nadaraha, (2000) *Bargaining position dan bargaining power*
- Wilson, 1966:5 . *The Empowerment Manual.* Grower Publishing Gompany, London
- Wahab. Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijaksanaan,* Bumi Aksara.
- Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, (2002)

PEDOMAN WAWANCARA

“ IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO “

Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan alat tangkap ikan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Apakah ada tujuan dari di adakannya penyaluran program batuan alat tangkap kepada masyarakat nelayan dari Dinas Kelautan?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Dalam penyaluran program bantuan tersebut apakah di lakukan pertahun oleh Dinas terkait ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Apa saja bentuk bantuan saja yang di berikan dari Pemerintah Dinas Kelutan dan Perikanan kepada kelompok nelayan ?

.....
.....

.....
.....
.....
.....

5. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan berlangsung?

.....
.....
.....
.....
.....

6. Untuk bisa mendapatkan bantuan maka dari itu apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh kelompok nelayan?

.....
.....
.....
.....
.....

7. Apakah ada hambatan yang dalam mengimplementasikan program bantuan alat tangkap ikan tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA

“ IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO “

NELAYAN

1. Apa Mafaat yang dapat di rasakan oleh nelayan dari program bantuan alat tangkap ikan yang di salurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ?

.....
.....
.....
.....

2. Dalam mengimplementasikan program bantuan apakah masyarakat nelayan masih mempunyai kendala terkait penerimaan bantuan tersebut ?

.....
.....
.....
.....

3. Apa saja permasalahan yang di rasakan oleh pihak nelayan dalam penerimaan bantuan?

.....
.....
.....
.....

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap

(Bapak Fany Morai S.PI)



Wawancara dengan Bidang Seksi Kenelayanan

(Ibu Nurain Abdurrahman S.PI)



Wawancara Dengan Nelayan

(Rahman Husain)



Wawancara Dengan Nelayan

(Amran Lasena)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3658/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Melan Karuana
NIM : S2118136
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BOALEMO
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : JL. Sultan Hurudji Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol/141/XI/2021

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo, setelah membaca surat Ketua Lemlit Universitas Ichsan Gorontalo. Nomor : 3658/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021 Tanggal 16 Oktober 2021 perihal Permohonan Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Melan Karuana
NIM : S2118136
Fak/Prodi : Fakultas ilmu Sosial, Ilmu Politik
Alamat : Dusun II Labuhan Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Judul Penelitian : "Implentasi Program Bantuan Alat tangkap Ikan di Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo"
Lokasi Penelitian : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo
Waktu : 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021 s.d 02 Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian.
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak memtaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 01 Desember 2021
KEPALA KANTOR KESBANG POL
KABUPATEN BOALEMO



Tembusan :

1. Yth. Plt Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Lemlit UNISAN Gorontalo
3. Yth. Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Boalemo
4. Yang bersangkutan

Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 75 Tilamuta, 96363

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 523/Dislutan/47a / II / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Asra Umar Murad
Nip : 19680928 200012 2 006
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melan Karuana
NIM : S2118136
Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar – Benar telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " Implementasi Program Bantuan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dari tanggal 02 Desember 2021 – 02 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tilamuta , 03 Februari 2022.

KEPALA DINAS,
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ir. ASRA UMAR MURAD
Rembina Utama Muda / IVc
Nip.19680928 200012 2 006

ABSTRACT

*MERLAN KARUANA, S2118136. IMPLEMENTATION OF FISHING
TOOLS ASSISTANCE PROGRAM IN TILAMUTA SUBDISTRICT,
BOALEMO DISTRICT*

This study is aimed at finding the implementation of fishing tools assistance program addressed to the fishermen in Tilamuta Subdistrict, Boalemo District. This study employs a qualitative method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is interactive data analysis. The results of the study indicate that the implementation of the fishing tools assistance program provided by the Marine Affairs and Fisheries Department has provided benefits to traditional fishermen in increasing fish catches. However, the assistance program has not been properly realized and has not been optimally managed by the fishing groups. Not all fishermen of their group experience the same benefits with the fishing tools program donated. The description of the policy aspects of this program has not been followed up with guidance to fishing groups. It is not supported by adequate funding, human resources, facilities, and infrastructure. The information aspect shows that the fishing community that manages the assistance is lack sources of information in managing the assistance provided. The support aspect shows that there are extension workers who are less active in coaching and assisting fishing groups in assisting fishing tools and monitoring and evaluating teams considered less than optimal. The aspect of potential distribution shows that this assistance distribution program has not been followed by clarity on the authority to use assistance. The assistance is not experienced by all members of traditional fishing groups because there are no strict rules to regulate the use of fishing tools in rotation.

Keywords: program implementation, Marine Affairs and Fisheries Department



ABSTRAK

MERLAN KARUANA, S2118136. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program bantuan alat tangkap kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah teknik analisis interaktif data yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian implementasi program bantuan alat tangkap ikan yang di berikan oleh dinas kelautan dan perikanan telah memberikan manfaat kepada nelayan tradisional dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan. Akan tetapi program bantuan tersebut belum terealisasi dengan baik dan belum terkelola dengan maksimal oleh kelompok nelayan. Dimana belum semua anggota nelayan tergabung dalam kelompok nelayan merasakan manfaat yang sama yang di berikan dari program alat tangkap yang dihibahkan. Deskripsi aspek kebijakan program ini belum di ikuti dengan pembinaan kepada kelompok nelayan dan kurang di dukung pendanaan yang menadai, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Aspek informasi menunjukan bahwa masyarakat nelayan yang mengelola bantuan kurang memiliki sumber informasi dalam mengelola bantuan yang diberikan: aspek dukungan menunjukan adanya petugas penyuluhan yang kurang aktif dalam melakukan pembinaan dan mendampingi kelompok nelayan dalam bantuan alat tangkap ikan serta tim monitoring dan evaluasi yang kurang maksimal: dan aspek pembagian potensi menunjukan bahwa program penyaluran bantuan ini belum diikuti dengan kejelasan terhadap kewenangan penggunaan bantuan sehingga bantuan tersebut tidak dinikmati oleh semua anggota kelompok nelayan tradisional karena tidak ada aturan yang tegas untuk mengatur penggunaan alat tangkap ikan secara berdrt.

Kata kunci: implementasi program, Dinas Kelautan dan Perikanan





Similarity Report ID: oid:25211:18680165

PAPER NAME

SKRIPSI_S2118136_MERLAN KARUANA_
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN A
LAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN TIL
AMUTA

AUTHOR

S2118136 MERLAN KARUANA

WORD COUNT

8241 Words

CHARACTER COUNT

55274 Characters

PAGE COUNT

53 Pages

FILE SIZE

88.7KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2022 12:45 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 13, 2022 12:49 AM GMT+8

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

30% Internet database

- 5% Publications database

Crossref database

- Crossref Posted Content database

1% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

- Small Matches (Less than 25 words)

9	sep.ejournal.unri.ac.id	Internet	1%
10	scribd.com	Internet	1%
11	123dok.com	Internet	<1%
12	repository.umrah.ac.id	Internet	<1%
13	repository.uhn.ac.id	Internet	<1%
14	eprints.umm.ac.id	Internet	<1%
15	mafiadoc.com	Internet	<1%
16	jdih.kkp.go.id	Internet	<1%
17	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
18	jiana.ejournal.unri.ac.id	Internet	<1%
19	lib.unnes.ac.id	Internet	<1%
20	docplayer.info	Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:18680165

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
2	jurnal.unigo.ac.id Internet	<1%
3	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
5	id.scribd.com Internet	<1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 127/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MERLAN KARUANA
NIM : S2118136
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Alat Tangkap Ikan Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

NAMA : MERLAN KARUANA

NIM : S2118136

FAKULTAS : ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

NAMA ORANG TUA :

➤ AYAH : RAUF KARUANA

➤ IBU : DERMA LASENA

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2011	SDN 02 TILAMUTA	TILAMUTA	BERIJAZAH
2.	2012-2015	SMP NEG. 4 TILAMUTA	TILAMUTA	BERIJAZAH
3.	2015-2018	SMK NEG. 1 BOALEMO	TILAMUTA	BERIJAZAH
4.	2018-2022	UNIERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH